

# PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DESA PINCARA KABUPATEN PINRANG

*The Effect Of Community Participation On Village Public Policy  
Transparency Pincara District Pinrang*

**Nur Eka Putri**

Email : [nureka1720@gmail.com](mailto:nureka1720@gmail.com)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi  
Selatan Kode Pos 91131

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap transparansi kebijakan publik Desa Pincara Kabupaten Pinrang, dan bagaimana kondisi ekonomi keluarga Di Desa Pincara Kabupaten Pinrang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi masyarakat menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koesioner sampel dan penelitian ini berjumlah 70 responden.

Adapun hasil analisis dengan nilai signifikan  $<0,05$  yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap transparansi kebijakan publik dengan nilai R adalah 7,52%. Korelasi antara partisipasi masyarakat dengan transparansi kebijakan publik adalah 0,752. Dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinan  $r$  square sebesar sebesar 0,565 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas partisipasi masyarakat terhadap variabel terikat transparansi kebijakan publik adalah 7,52% jadi dapat dikatakan bahwa 7,52% variabel partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel transparansi kebijakan publik. Hal yang terungkap bahwa kepala desa pincara kurang sosialisasi kepada masyarakat dan jarang juga melakukan rapat dengan masyarakat sekitar terkait anggaran desa tersebut.

**Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik**

## Abstract

*This study aims to determine the effect of community participation on public policy transparency in Pincara Village, Pinrang District, and how the economic conditions of families in Pincara Village, Pinrang District. Community participation is the key to success in the implementation of regional autonomy because community participation involves aspects of monitoring and aspirations. This research is a type of research that uses quantitative research while the data collection technique used in this research is a sample questionnaire and this study totals 70 respondents.*

*The results of the analysis with a significant value  $<0.05$  which indicates that public participation is a part of public policy transparency. with an R-value of 7.52%. the correlation between public participation and public policy transparency is 0.752. From these results, it is obtained that the determinant coefficient  $r$  square is 0.565 which implies that the influence of the independent variable of public participation on the dependent variable of public policy transparency is 7.52% so it can be said that 7.52% of the public participation variable can be explained by the public policy transparency variable. It was revealed that the Pincara village*



Journal AK-99

ISSN : 2775-6726

Volume 3 Nomor 1, Mei 2023

*head lacked outreach to the community and rarely held meetings with the surrounding community regarding the village budget.*

**Keywords: Participation, Community, Public Policy Transparency**

## PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU No. 22/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Azis (2015) menyebut bahwa hasil laporan keuangan pemerintah semester I Tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) Semester II Tahun 2014. Indikatornya adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hasil audit badan pemeriksa keuangan menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat masih lebih baik dibandingkan daerah yang kurang baik. Pemerintah Daerah diminta terus mendorong upaya perbaikan pelaporan keuangan Azis menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan atau tidak tepat waktu, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com). Dalam Situmorang (2016).

Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan. transparansi, partisipasi masyarakat, dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina Dan Bagianto (2019) diperoleh hasil pengendalian internal, transparansi, berpengaruh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Faisal (2016) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kabupaten Lamongan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mursidah Dan Khairina (2018) diperoleh hasil transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan asuransi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Budiawan Dan Budi (2014) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2017) diperoleh hasil akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pinrang. Transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan Pasal 2 Pp Nomor 45 Tahun 2017 Tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan Daerah. Pada proses pembentukan peraturan daerah perencanaan aspirasi masyarakat tersebut dapat ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut.

Lemahnya transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya sistem akuntansi pemerintahan daerah saat ini transparansi dalam



laporan keuangan sering menjadi problem bagi Daerah. Laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat Akbar, 2015. Semua program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pinrang sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di negara indonesia untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Adanya partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata keterlibatan masyarakat dari suatu proses mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi keuangan daerah merupakan pemberdayaan masyarakat yang berarti pula sebagai upaya dari pemerintah menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya dan daerah sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.

### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Pincara Kabupaten Pinrang yang beralamatkan di Jalan Poros Pincara – Teppo No Kode Pos 91252. Waktu penelitian yang digunakan sekitar 3 bulan yang telah dilakukan mulai Januari – Maret 2022.

Populasi Dalam Penelitian Ini Adalah Masyarakat Desa Pincara Kabupaten Pinrang. Dengan Jumlah Kuesioner Yang Tersebar Adalah Sebanyak 70 Kuesioner. Sampel yang digunakan dengan sensus yaitu semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka menggunakan beberapa metode yang mempermudah penelitian ini, antara lain:

- Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang, karena apa yang dikatakan Sebelumnya tentu sesuai dengan yang dikerjakan.
- Kuesioner adalah salah satu instrument krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer.

Teknik analisis adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pemerintahan. Analisis regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan antara satu variabel bebas/ prediktor (X) dengan satu variabel tak bebas/ responden (Y).

### HASIL PENELITIAN

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Instandardized Coefficients B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Constant)	24,342	14,760		1,649	,104
Partisipasi Masyarakat	1,253	,480	,350	2,610	,011
Transparansi Kebijakan Publik	,883	,384	,212	2,301	,025

Dependent Variable



Sumber Data : Hasil Olah Data Spss Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 24,342 + 14,760X + 1,649 + 104$$

Dimana : Y = Transparansi Kebijakan Publik

X = Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tabel tersebut disajikan kembali nilai koefisien regresi untuk masing - masing variabel bebas untuk variabel x (partisipasi masyarakat) bernilai 1,253 (bernilai positif artinya setiap partisipasi masyarakat akan meningkatkan transparansi kebijakan publik sebesar 8,83 % dan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat).

**Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error Of The Estimate
	,752 <sup>a</sup>	,565	,538	6,38317

A. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik ( Y ) Partisipasi Masyarakat ( X )

Sumber Data: Hasil Olah Data SPSS Versi 25, 2022

Berdasarkan tabel 2, maka dapat dilihat bahwa nilai (R) yaitu 0,752 untuk mengetahui besarnya variasi dari yang diperoleh koefisien determinasi *R Square* sebesar 0,565 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,538 %. Sisanya terdapat 5,38 % faktor - faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Simultan (Uji F)**

Anova<sup>a</sup>

Model	Sum Of Squares	Mean Square	F	Sig.
Regression	3437,067	859,267	089	0 <sup>b</sup>
Residual	2648,418	40,745		
Total	6085,486			

A. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat

B. Predictors: (Constant), Transparansi Kebijakan Publik

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi sederhana menunjukkan hasil f hitung sebesar 721,089 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai f hitung (721,089) lebih besar dari. Nilai F Tabelnya Sebesar 3,13 (Df1= 3 -1= 2 Dan Df2= 70 - 3 = 67), Maka X Ditolak Dan Y Diterima. Berarti variabel partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Desa Pincara Kabupaten Pinrang

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga dari segi profesi petani dan buruh pabrik berpengaruh positif atau signifikan terhadap transparansi kebijakan publik remaja di Desa Pincara Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa keluarga yang berprofesi sebagai petani dan buruh pabrik berpengaruh terhadap



transparansi kebijakan publik anaknya karena penghasilan yang diperoleh petani dan buruh pabrik dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya sehingga anaknya termotivasi untuk terus belajar dan bahkan melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Serta dikatakan semakin tinggi tingkat ekonomi keluarga atau masyarakat maka semakin tinggi juga transparansi kebijakan publik masyarakat karena akan termotivasi untuk belajar dengan giat ketika segala perlengkapan atau kebutuhan baik kebutuhan persawahan maupun kebutuhan lainnya terpenuhi dengan baik.

Kontribusi pengaruh partisipasi masyarakat (X) terhadap transparansi kebijakan publik (Y) dapat dilihat dari *R Square* Sebesar 0,565% yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 5,65 %. Sisanya terdapat 5,38 % faktor - faktor lain yang mempengaruhi yang tidak diteliti oleh peneliti. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Oleh D Setyorini (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif atau signifikansi terhadap transparansi kebijakan publik.

#### **a. Indikator Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator tersebut antara lain yaitu: Menurut Keith Davis Dalam Intan Dan Mussadun (2013) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat .

##### **1. Pikiran**

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan

##### **2. Tenaga**

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki baik secara kelompok maupun individu agar tercapai yang diinginkan.

##### **3. Keahlian**

Merupakan Jenis Partisipasi Dimana Keahlian Merupakan Unsur Yang Paling Diinginkan Untuk Menentukan Keinginan.

##### **4. Barang**

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.

##### **5. Uang**

Merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang orang kalangan atas.

#### **b. Indikator Transparansi Kebijakan Publik**

Transparansi kebijakan publik dapat dilihat berdasarkan indikator tersebut antara lain yaitu : Menurut Lilis Puspitawati Dan Sri Dewi Anggadini (2011) Pemberian Arus Informasi, Berita, Penjelasan Mekanisme, Prosedur, Data, Fakta, Kepada Stakeholders Yang Membutuhkan Informasi Jelas Dan Akurat.

##### **1. Tepat Waktu**

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan.

##### **2. Memadai**

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

### 3. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

### 4. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan - kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut, akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Akurat juga berarti informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya, artinya informasi bebas dari kesalahan, tidak bias ataupun menyesatkan, akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan

### 5. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak masyarakat Tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil pengujian regresi secara simultan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel Partisipasi Masyarakat (X) terhadap transparansi kebijakan publik (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,005$ . Angka *adjusted R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,538 % atau 5,38 %. Di lihat dari beberapa sumber penghasilan masyarakat di Desa Pincara yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa peluang masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarganya itu sangat banyak sehingga dikatakan bahwasanya tingkat atau kondisi ekonomi keluarga di Desa Pincara Kabupaten Pinrang masuk dalam kategori tinggal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh D Setyorini (2014) yang menyatakan bahawa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif atau signifikansi terhadap Transparansi Kebijakan Publik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ingin menyampaikan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu memperhatikan peraturan perundang – undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta lebih memperhatikan aspirasi – aspirasi masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan mampu mengembangkan variabel bebas.
3. Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuat sebuah laporan keuangan yang jelas dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. 2015. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Studi Pada Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Bandung.
- Arum, N., S. 2016. Pengaruh Partisipasi Penyusun Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial OPD (Studi Pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Pulu Kota). JOMFekon.
- Ardila, Lisa 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi. *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Pancasakti Tegal.



- Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Di Dprd Kabupaten Karanganyar.
- Badok .2018. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi, Akuntabilitas Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan.
- Burhan, 2014 Bungi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: Prenada Media Group,).
- Coryanata. 2012. Jurnal Akuntansi Dan Investasi. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik.
- Dharmanegara. 2010. Pengertian Partisipasi Masyarakat Penyusunan Anggaran. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Fitria Hartami . 2021. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- Hamsinar. 2017. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indriani, M. 2019. Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey Pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Jainuri . 2013 . Model Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Malang” Malang.
- Jatmiko .2020 . Pengaruh Pengawasan Intern Dan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik. Di Kota Semarang.
- Kusnadi, Y., & Mutoharoh. (2016). Pengertian Analisis Deskriptif. *Jurnal PARADIGMA*.
- Kurniawan, Arif.” 2012 Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan Apbd. Kota Surakarta Jawa Tengah.
- Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2021 Diakses Wwww. Pinrang Kab.Bps.Go.Id Diakses Tanggal 23 Agustus 2021.
- Lambajang. 2019. Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Skripsi*: Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Sofi, Kohen.2015"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Binta"Tanjung Pinang,
- Satria. 2017 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Pemerintah Daerah. Kota Pinrang,
- Sugiarti .2011 .Partisipasi Masyarakat Yang Seluas – Luasnya Telah Diberikan Oleh Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Kabupaten Sukoharjo.